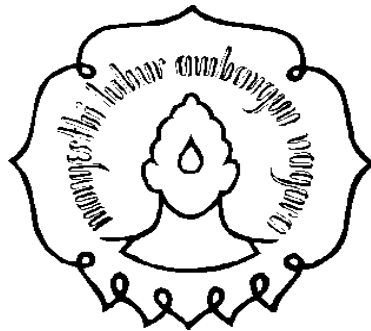


Skim Hibah*: Penelitian Mandiri Aktif
Bidang Unggulan**: Pembangunan Manusia dan
Daya Saing Bangsa

LAPORAN AKHIR



EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI JAWA TIMUR

Manajemen PKLK/No. K 12162223

Ketua Peneliti:
Erma Kumala Sari, M.Psi., Psi./NIDN. 0030118405

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

No. Reg:

00301184058320190

Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Program Pendidikan Inklusif Di Provinsi Timur
Bidang Ilmu / Group Riset : PENDIDIKAN / MANAGEMEN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN I
Bidang Kajian : Pembangunan manusia dan daya saing bangsa
SKIM : Skema Penelitian Mandiri
Ketua Penelitian
A. Nama Ketua : ERMA KUMALA SARI
B. NIDN : 0030118405
C. Jabatan Fungsional :
D. Fakultas / Program Studi : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN / S-1 Pendidikan Luar Biasa
E. Nomor HP : 08174114900
F. Email : ermakumalasari@staff.uns.ac.id
Anggota Penelitian
1. Nama / NIDN(Kode Reg.) Group Riset : Ravik Karsidi / 0007075713
2. Nama / NIDN(Kode Reg.) Group Riset : Munawir Yusuf / 0001055504
3. Nama / NIDN(Kode Reg.) Group Riset : Tias Martika / 0007039102
Penelitian Tahun Ke- : 1

Mengetahui,
Koordinator Group Riset



ERMA KUMALA SARI S.Psi., M.Psi. Psikolog.
NIDN. 0030118405

Menyetujui,
Ketua LPPM,



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.
NIDN. 0027036305

Surakarta, 29 November 2019
Ketua Peneliti



ERMA KUMALA SARI S.Psi., M.Psi. Psikolog.
NIDN. 0030118405

Mengetahui,
KPPMF



Dr. Eng. Nugroho Agung Pambudi, M.Eng.
NIDN. 0030128107

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN RENCANA PENELITIAN.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
BAB II. PETA JALAN RISET DAN PENCAPAIAN INOVASI.....	10
BAB III. METODE PENELITIAN.....	13
BAB IV. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	20

RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk sistem layanan pendidikan non diskriminatif yang akan diberlakukan di semua sekolah reguler baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di Indonesia, pendidikan inklusif telah dikembangkan sejak tahun 2003 setelah adanya payung hukum dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosi dan sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum dan/atau berupa satuan pendidikan khusus. Penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan inklusif dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk mengetahui peta pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia guna menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis riset yang didukung oleh regulasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), guru yang kompeten dan profesional, aksesibilitas lingkungan dan fisik, serta tumbuhnya budaya inklusif dalam pembelajaran di setiap sekolah. Penelitian tersebut juga menjadi salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satu provinsi yang telah mengimplementasikan pendidikan inklusi adalah provinsi Jawa Timur. Pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan tersebut membutuhkan program monitoring untuk menjaga implelementasi pendidikan inklusi agar tetap sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan monitoring implelementasi pendidikan inklusi tersebut perlu dilakukan proses evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan monitoring implementasi program pendidikan inklusi di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Isu tentang pendidikan inklusif telah menjadi tema penting dalam percaturan pendidikan di Indonesia. Tidak saja karena isu tersebut merupakan bagian dari *'international issues'* yang selalu digelorakan oleh negara-negara maju agar negara-negara berkembang ikut meratifikasi berbagai konvensi dunia dalam rangka mewujudkan hak pendidikan untuk semua anak, akan tetapi juga semakin disadari bahwa membangun pendidikan yang luas dan bermutu, tidak mungkin dilakukan secara diskriminatif hanya mengutamakan mereka yang 'normal' dan/atau yang memiliki potensi di atas rata-rata atau luar biasa. Anak-anak dengan kondisi keterbatasan secara fisik, mental, emosi dan atau sosial dan ekonomi, termasuk kelompok difabel, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan masa depan. Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk sistem layanan pendidikan non diskriminatif yang akan diberlakukan di semua sekolah reguler baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA.

Di negara-negara yang telah lama menerapkan program pendidikan inklusif, terutama di negara-negara maju, pendidikan inklusif dimaknai secara lebih luas dalam konteks kultur sekolah yang menekankan pada bagaimana sekolah, kelas, dan struktur kurikulum didesain untuk semua anak dapat mengikuti pembelajaran dan berkembang secara optimal (Kugelmass, 2004). Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan kesempatan hak, keadilan dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Sunaryo, 2009). Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian pendidikan inklusif menjamin akses dan mutu pendidikan.

Pendidikan inklusif oleh UNESCO didefinisikan sebagai proses menangani dan merespon beragam kebutuhan semua peserta didik dengan meningkatkan partisipasi

dalam pembelajaran dan mengurangi exclusion dalam dan dari pendidikan. Ini berarti bahwa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang mampu melayani, sejauh mungkin, dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendidikan inklusif telah berkembang pesat di negara-negara maju dan dalam beberapa tahun terakhir mulai dikembangkan di banyak negara berkembang. Anak-anak disabilitas yang semula hanya dapat bersekolah di sekolah khusus (SLB), dengan pendidikan inklusif mereka dimungkinkan belajar bersama-sama di sekolah reguler secara inklusif bersama dengan anak-anak pada umumnya.

Di Indonesia pendidikan inklusif telah dikembangkan sejak tahun 2003 setelah adanya payung hukum dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosi dan sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum dan/atau berupa satuan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif di Indonesia telah dikembangkan luas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota sejak tahun 2003. Kini jumlah sekolah inklusi SD, SMP, SMA/SMK telah mencapai lebih dari 3000 sekolah (Direktorat Pembinaan PKPLK, dalam Yusuf, 2016).

Melalui pendidikan inklusif angka partisipasi pendidikan bagi anak disabilitas akan semakin tinggi (saat ini baru mencapai sekitar 36%: Wamendikbud RI, 2012). Secara akademik dan sosial pendidikan inklusif juga memungkinkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Hasil riset Waldron dan McLesky (2009) di Universitas Florida, antara lain menemukan bahwa prestasi akademik, hubungan sosial dan perilaku kelas siswa disabilitas di sekolah inklusi hasilnya lebih baik dibanding dengan siswa disabilitas yang dipisah dari kelas inklusi. Penelitian serupa dilakukan Salend dan Garrick Duhaney (1999) State University of New York, menemukan bahwa (1) dampak program inklusi pada kinerja akademik dan pembangunan sosial dari siswa disabilitas sangat positif, (2) penempatan siswa disabilitas dalam kelas inklusi tidak mengganggu kinerja akademik dan memiliki beberapa manfaat sosial bagi mereka. (3) respon guru untuk program inklusi yang kompleks dipengaruhi oleh beberapa variabel dan akan selalu berubah seiring perjalanan waktu.

Banyak manfaat yang diperoleh dari pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas semakin terbuka sehingga hak pendidikan bagi mereka semakin terpenuhi. Beberapa negara maju memiliki pengalaman dan berhasil mempromosikan praktik pendidikan inklusif dan kebijakan yang menghilangkan hambatan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan semua anak untuk belajar. Namun di negara-negara berkembang yang lebih miskin, proses menciptakan sebuah sistem yang inklusif lebih sulit. Faktor-faktor yang menyebabkan: kurangnya dana, tingkat dukungan kebijakan administratif dan persoalan terbatasnya guru pembimbing khusus yang terlatih (Nguyet, Dinh Thi dan Thu Ha, Le : 2010).

Penelitian tentang pendidikan inklusif di Indonesia juga telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan penulis terkait dengan pendidikan inklusif telah menghasilkan berbagai temuan, di antaranya adalah (1) profil implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, bersama dengan Sunardi, dkk (2012), (2) kontribusi pendidikan inklusif dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Yusuf, dkk. 2011), (3) peta permasalahan dalam pendidikan inklusif di beberapa daerah di Indonesia (Sunardi, dkk. 2011; Yusuf, dkk. 2012 dan 2013; Gunarhadi, dkk. 2014; (4) pedoman evaluasi diri sekolah inklusi di Indonesia (Yusuf, 2014), (5) model manajemen sekolah inklusi (Yusuf, 2014); (6) dihasilkan bahan pembelajaran utama pendidikan inklusif di PT LPTK (Yusuf, dkk. 2015-2016), dan (6) pembudayaan pendidikan inklusif di Indonesia melalui peran kabupaten kota (Mudjito, dkk, 2015).

Penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan inklusif dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk mengetahui peta pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia guna menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis riset yang didukung oleh regulasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), guru yang kompeten dan profesional, aksesibilitas lingkungan dan fisik, serta tumbuhnya budaya inklusif dalam pembelajaran di setiap sekolah. Penelitian tersebut juga menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2015 tentang tugas dan fungsi disebutkan pada pasal 452 bahwa Direktorat Pembinaan PK-LK bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Salah satu

dari sepuluh program prioritas yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan PK-LK adalah program pendidikan inklusif. Program ini telah dilaksanakan secara konsisten lebih dari 3 tahun dan tetap dilanjutkan untuk jangka waktu minimal sampai dengan 2019 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja terhadap program tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi sehingga proses perbaikan dapat terus dilakukan. Saat ini sebanyak 23 propinsi dan 70 Kab/Kota telah menyelenggarakan gerakan pembudayaan pendidikan inklusif. Beberapa kabupaten di provinsi Jawa Timur juga telah mengimplementasikan program pendidikan inklusi, seperti misalnya kabupaten Pacitan dan Magetan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif perlu dilakukan untuk memperoleh data hasil evaluasi dari penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, salah satunya di provinsi Jawa Timur. Pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan tersebut membutuhkan program evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi pendidikan inklusi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di provinsi Jawa Timur.

Tujuan Umum Penelitian:

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan monitoring program pendidikan inklusi di provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi pendidikan inklusi. Tujuan kegiatan evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif ini adalah sekolah inklusif di provinsi Jawa Timur ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi terkait kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah inklusif (SD, SMP, SMA/SMK) di provinsi Jawa Timur.

Tujuan Khusus Penelitian:

1. Melakukan evaluasi kegiatan monitoring implementasi program pendidikan inklusi di provinsi Jawa Timur
2. Penulisan artikel ilmiah untuk seminar internasional.

Perumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah inklusi di provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana monitoring pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah inklusi di provinsi Jawa Timur?

Manfaat Penelitian

Kegiatan evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Diperolehnya data dan laporan terkait dengan hasil evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah inklusif (SD, SMP, SMA/SMK) di provinsi Jawa Timur.
2. Data dan laporan tersebut dapat menjadi acuan rekomendasi dan tindak lanjut atas kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah inklusif (SD, SMP, SMA/SMK) di provinsi Jawa Timur.

Target Penelitian:

1. Terumuskan data hasil evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah inklusif (SD, SMP, SMA/SMK) di provinsi Jawa Timur.
2. Menulis artikel ilmiah untuk seminar internasional.

BAB II

PETA JALAN RISET DAN PENCAPAIAN INOVASI

Road Map Penelitian Dalam RG

		2012 - 2013	2014 – 2015	2016 - 2017
		Pengembangan sandarisasi perangkat penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang efektif Dikdasmen	Penguatan LPTK PT dalam mendukung penyelenggaraan PI di Dikdasmen	Standarisasi Bahan ajar PI di LPTK
	Pendidikan Inklusif	Penguatan Tata Kelola dan kesiapan stakeholders dalam PI Dikdasmen		Budaya Pendidikan Inklusif
		Pengembangan model –model pembelajaran yang efektif di kelas inklusif Dikdasmen	Keterpaduan Kurikulum 2013 dengan kebijakan pendidikan inklusif	Terbitnya Buku-buku Teks berbasis Riset PI
Pendidikan Khusus				
		Pengembangan sandarisasi SLB sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Identifikasi kebutuhan SLB dalam memenuhi standar nas pendidikan	SLB dengan peran lebih (pusat sumber)
	Pendidikan Segregatif	Penguatan Tata Kelola SLB menuju 8 SNP Pendidikan Dasar dan Menengah	Manajemen SLB yang efektif berbasis Kurikulum 2013	Terbitnya Buku-buku Teks Pendidikan ABK
		Mengembangkan model –model pembelajaran yang efektif di SLB sesuai jenis kelainan anak	Pengembangan model-model intervensi untuk Kemandirian ABK	Kemandirian ALB Pasca Sekolah

Capaian Kinerja RG sebelumnya

Sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan UNS di bidang pendidikan inklusif, penulis telah melakukan beberapa kajian penelitian tentang pendidikan inklusif. Pada tahun 2010, Yusuf dan Indianto (2010) melakukan penelitian tentang sumbangan sekolah inklusi terhadap peningkatan angka partisipasi murni (APM) pendidikan bagi ABK. Dari hasil riset tersebut diketahui bahwa keberadaan sekolah

inklusi di Kab. Boyolali dalam tahun 2009/2010 mampu menampung sekitar 13% dari total siswa SD Inklusi, atau sekitar 1.173 siswa ABK. Jumlah ini melebihi jumlah siswa SLB yang ada di Kab. Boyolali pada saat itu.

Pada tahun 2011 penulis bersama dengan Sunardi, Gunarhadi dan Priyono melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Dari 183 sekolah inklusi yang diteliti dari beberapa provinsi di Indonesia, antara lain ditemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif di setiap sekolah sangat beragam dan masih jauh dari standar penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diharapkan (Sunardi, Yusuf, Gunarhadi, Priono, 2011).

Pada tahun 2012, penulis melakukan penelitian bersama Indianto dan Munzayanah (2012) di beberapa Kab/Kota se Solo Raya, menemukan bahwa kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, masih berada pada tingkat sedang dan rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, pemahaman yang sempit, pengetahuan yang rendah, sosialisasi yang terbatas, fasilitas pendukung yang kurang memadai, cara pandang yang belum tepat, serta koordinasi yang lemah tentang pendidikan inklusif.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan UPI Bandung (Sunardi, 2009), menemukan beberapa dilema pendidikan inklusif, diantaranya adalah (1) masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler tanpa upaya untuk mengakomodasikan kebutuhan khususnya; (2) munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusivisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Akselerasi, Sekolah Favorit, Sekolah Percontohan, dan lain-lain. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua karena menerima ABK dapat dianggap sama dengan *special school* (SLB); (3) masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba pembelajaran sehingga hanya terkesan program eksperimental.

Pada tahun 2012 – 2013 penulis melakukan penelitian tentang pengembangan model manajemen pendidikan inklusif di SD. Hasil penelitian antara lain menunjukkan

bahwa setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melakukan penyesuaian manajemen sekolah dan menerapkan manajemen pendidikan inklusif. Model manajemen pendidikan inklusif yang dihasilkan dari penelitian ini mengharuskan ada 9 komponen manajemen sekolah yang harus dilakukan penyesuaian agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik (Yusuf, 2014).

Pada tahun 2014 penulis melakukan penelitian tentang pengembangan model pemberdayaan sekolah inklusi dalam rangka mewujudkan sekolah yang ramah terhadap semua anak. Hal ini penting karena fakta di lapangan masih ditemukan bahwa pendidikan inklusif masih tergantung pada peran kepala sekolah, padahal seharusnya semua komponen sekolah bekerjasama dalam implementasi pendidikan inklusif. (Yusuf, 2014).

Tahun 2015 dan 2016 penulis melalui RG melakukan penelitian tentang pengembangan model pengembangan bahan ajar utama pendidikan inklusif. Hasilnya adalah berupa buku materi dan rujukan untuk MK Pendidikan Inklusif di PT yang saat ini masih sedang dilakukan penelitian lanjutan.

Dengan berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa issue pendidikan inklusif yang telah berkembang pesat di lapangan, harus dibarengi dengan penyiapan calon guru yang memahami tentang pendidikan inklusif. Pengembangan bahan ajar utama pendidikan inklusif dan perlindungan anak bagi calon guru di LPTK akan membantu mengatasi kesenjangan antara peran kampus dengan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terkait dengan evaluasi dari implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Prosedur Penelitian

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen (kuesioner) dan interviu untuk mendapatkan evaluasi dengan menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusif di Indonesia yang terwakili dari sampel penelitian. Kuesioner diberikan pada beberapa kelompok responden, diantaranya kelompok responden siswa, guru, kepala sekolah, Dinas Pend/Pokja Inklusi. Data dokumentasi dan observasi lapangan juga akan digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. Selain itu, juga akan dilakukan seminar dengan mengundang ahli/pakar/praktisi/pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan inklusif untuk mempertajam analisis dan mendapat masukan mengenai evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif.

B. Populasi dan Sampel

Kegiatan evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif ini mengambil populasi sekolah inklusi di provinsi Jawa Timur dengan sample dua kabupaten/kota yaitu Pacitan dan Magetan. Pengambilan sampel dilakukan atas dasar wilayah-wilayah tersebut telah menerapkan pendidikan inklusif dalam jangka waktu yang cukup lama. Kegiatan ini melibatkan responden dan *stakeholder* yang terkait dengan pendidikan inklusif, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa. Sekolah-sekolah inklusi yang dilibatkan dalam penelitian ini dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen (kuesioner) dan interviu untuk mendapatkan evaluasi dengan menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusif di Indonesia yang terwakili dari sampel

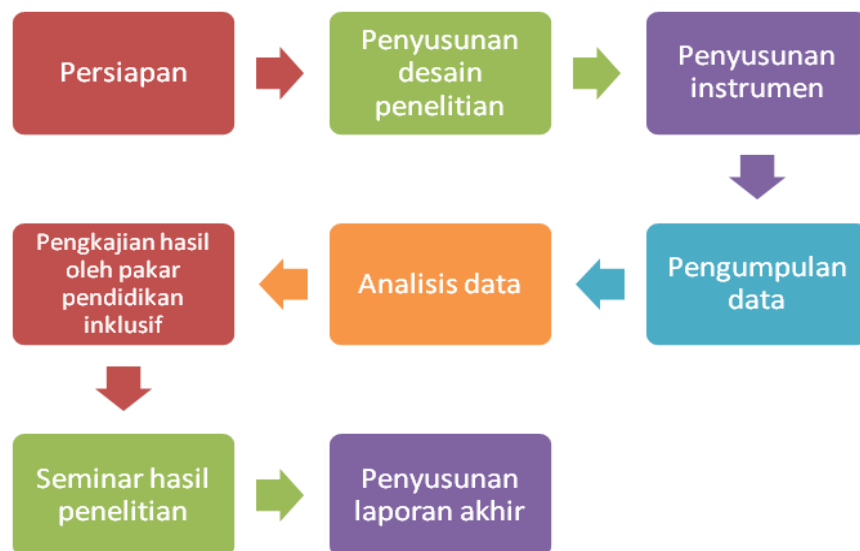
penelitian. Kuesioner diberikan pada beberapa kelompok responden, diantaranya kelompok responden siswa, guru, kepala sekolah, Dinas Pend/Pokja Inklusi. Data dokumentasi dan observasi lapangan juga akan digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. Selain itu, juga akan dilakukan seminar dengan mengundang ahli/pakar/praktisi/pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan inklusif untuk mempertajam analisis dan mendapat masukan mengenai evaluasi kebijakan program pendidikan inklusif.

D. Teknik Analisis Data

Semua data kuantitatif akan diolah dengan menggunakan statistik dengan bantuan SPSS. Sementara itu, data kualitatif akan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kuantitatif yang didapatkan dari kuesioner dan analisis kualitatif yang diperoleh dari interviu, data dokumentasi, observasi lapangan, serta masukan dari ahli/praktisi/pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan inklusif.

E. Tahapan Penelitian

Kegiatan ini terbagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Program Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Keterangan:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan akan dilakukan rapat dan koordinasi tim penelitian dengan pihak-pihak terkait yang menjadi sasaran program.

2. Penyusunan desain penelitian

Tim peneliti merumuskan desain penelitian yang akan digunakan untuk melaksanakan program evaluasi kebijak pendidikan inklusif.

3. Penyusunan instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket, interviu (wawancara), observasi, dan data dokumentasi lapangan.

4. Pengumpulan data

Tahap ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada masing-masing perwakilan daerah yang diambil sebagai sampel penelitian, yaitu kabupaten Boyolali, Karanganyar, Salatiga, dan Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan terhadap Dinas Pend Provinsi/Kab/Kota/Pokja Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis atau pengolahan data menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif.

6. Pengkajian hasil penelitian oleh pakar pendidikan inklusif

Hasil pengolahan data disusun menjadi sebuah laporan hasil penelitian, untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh ahli/pakar/praktisi/pengambil kebijakan pendidikan inklusif. Pengkajian oleh pakar pendidikan inklusif dimaksudkan untuk mendapatkan masukan serta rekomendasi terkait perbaikan program pendidikan inklusif di provinsi Jawa Timur .

7. Seminar hasil penelitian dilakukan pada sekolah-sekolah inklusif yang ada di wilayah pengambilan sampel.

8. Penyusunan laporan akhir

Laporan akhir disusun setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan.

F. Luaran Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 tahun yang secara keseluruhan akan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Data hasil evaluasi implementasi pendidikan inklusi di provinsi Jawa Timur
2. Instrumen evaluasi implementasi pendidikan inklusi
3. Artikel Seminar dan/atau Proceeding Seminar Nasional/Internasional

G. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama satu tahun (tahun 2019), dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Tahun 2019
1	Persiapan	V
2	Penyusunan desain penelitian	V
3	Penyusunan instrumen penelitian	V
4	Pengumpulan data	V
5	Analisis data	V
6	Pengkajian hasil penelitian oleh pakar pendidikan inklusif	V
7	Seminar hasil penelitian	V
8	Penyusunan artikel ilmiah	V
9	Pelaporan akhir	V

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

Berikut ini adalah rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini:

1. Persiapan
2. Penyusunan desain penelitian
3. Penyusunan instrumen penelitian
4. Pengumpulan data
5. Penyusunan artikel ilmiah
6. Analisis data
7. Pengkajian hasil penelitian oleh pakar pendidikan inklusif
8. Seminar hasil penelitian
9. Pelaporan akhir

B. HASIL PENELITIAN YANG TELAH DIPEROLEH

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini (terlampir):

1. Instrumen evaluasi implementasi program pendidikan inklusi di Jawa Timur (terlampir)
2. Data hasil evaluasi implementasi program pendidikan inklusi di Jawa Timur (terlampir)
3. Artikel evaluasi implementasi program pendidikan inklusi di Jawa Timur (terlampir)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Douglas, Saah N; Chapin, Shelley E; Nolan, James F (2016), Special Education Teachers, Experiences Supporting and Supervising Paraeducators, Implication for Special and General Education Settings, *The Journal of Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, Februari 2016, Vol. 39 No. 1, 60 – 70.
- Gehrke, Rebecca Swanson; Cocchiarella, Martha (2013), Preservice Special and General Educators Knowledge of Inclusion, *The Journal of Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, Agustus 2013, Vol. 36 No. 3, 204-2016.
- Kugelmass, Judi W. (2004), *The Inclusive School: Sustaining Equity and Standards*, Teacher College Press, Teacher College, Columbia University New York and London.
- Nguyet, Dinh Thi dan Thu Ha, Le (2010), *How To Guide Preparing Teachers for Inclusive Education*, CRS Vietnam.
- Permendiknas Nomor 70 tahun 2010 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkelainan dan/atau peserta Didik dengan Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.
- Permenpan dan RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Salend, Spencer J; Dunhaney, Laurel M. Garrick (1999), The Impact of Inclusion on Students With and Without Disabilities and Their Educator, *Journal of Remedial and Special Education*, March 1999 Vol. 20 no. 2, 114 – 126.
- Sindelar, Paul T; Brownell, Mary T; Billingsley, Bonnie (2010), Special Education Teacher Education Research : Current Status and Futire Directions, *The Journal of Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, Februari 2010, Vol. 33 No. 1, 8-24.
- Sunardi; Yusuf, Munawir; Gunarhadi; Priyono (2010), *The Implementation of Inclusive Education in Indonesia*, Research Report International Collaborative Research Grant Funded by World Class University Project DIPA Sebelas Maret University.
- Sunaryo, (2009), *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*, Jurusan PLB FIP UPI Bandung
- The NCPSE (National Clearinghouse for Professions Sspecial Education), (2002), *Special Education Teacher, Making a Difference in the Lives of Students with Special Needs*, Council for Exceptional Children 1110 North Glebe Road, Suite 300, Arlington.
- Takala, Marjatta; Pittimara, Raija; dan Tormanen, Minna (2009), *Inclusive Special Education : The Role of SSpecial Education Teachers in Finland*, Journal

Compilation @ 2009 NASEN, Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK and 350 Main St, Malden, MA, USA.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Van Laarhoven, Toni R; Munk, Denis D; Lynch, Kathleen; Bosma, Julie, dan Rouse, Joanne (2007), A Model for Preparing Special and General Education Preservice Teachers for Inclusive Education, *Journal of Teacher Education*, November/Desember 2007, Vol. 58 No. 5, 440 – 455.

Vernon-Dotson, Lisa J; Floyd, Loury O; Dukes, Charles; dan Darling, Sharon M (2014), Corse Delivery, Keystones of Effective Special Education Teacher Preparation, *The Journal of The Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, Februari 2014, vol. 37 no. 1, 34-50.

Waldron, Nancy L; McLeskey, JamesPacciano, Debra (1999), Giving Teachers a Voice : Teachers Perspective Regarding Elementary Inclusive School Programs (ISP), *The Journal of Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, July, 1999, Vol. 22 No. 3, 141-153.

Yusuf, Munawir dan Indianto, R. (2009), *Kajian Tentang Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Boyolali*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

Yusuf, Munawir, (2014), *Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Inklusif*, Disertasi, UNNES Semarang, 2014.

Yusuf, Munawir; Sunardi, Priyono, (2014), *Pengembangan Model Pemberdayaan Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Pembimbing Khusus dan Komite Sekolah dalam rangka Pendidikan Inklusif yang Ramah terhadap Semua Anak*, Laporan Penelitian, LPPM UNS.

Yusuf, Munawir, Choiri, Salim; Sugini; Rejeki, Dewi Sri (2015), *Pengembangan Model Bahan Pembelajaran Utama (BPU) Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*, Lapaoran Penelitian, LPPM UNS.

Yusuf, Munawir (2016), *Memperkokoh Eksistensi Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional , FIP UNESA, Surabaya tanggal 30 Januari 2016.

LAMPIRAN

1. INSTRUMEN

A. INSTRUMEN POKJA INKLUSI

INSTRUMEN-01 (POKJA INKLUSI)

1. Provinsi/Kab/Kota :
2. Nama Pengisi Instrumen :
3. Pekerjaan & Jabatan :
4. Nomor HP dan alamat email :

PETUNJUK :

BERIKAN TANDA SILANG (X) PADA KOLOM (1), (2) ATAU (3) SESUAI DENGAN KONDISI YANG SEBENARNYA

No	Program	Di bawah ini terdapat beberapa daftar kegiatan yang terkait dengan Implementasi Pendidikan Inklusif di tingkat Provinsi atau Kab/Kota. (MOHON DIISI SESUAI KONDISI YG SEBENARNYA)	Tidak Ada /Tidak terprogram kan (1)	Ada Terlaksana sebagian (2)	Ada Terlaksana semua (3)	Keterangan (Kalau Ada)
1	Peningkatan kapasitas SDM Penyelenggara Pendidikan Inklusif	1. Sosialisasi Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)				
		2. Workshop/Diklat Pendidikan Inklusif bagi Guru sekolah reguler (SD, SMP, SMA, SMK)				
		3. Diklat Pendidikan Inklusif bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK)				
		4. Studi Banding Pendidikan Inklusif bagi Guru ke sekolah lain (di luar Prov/Kab/Kota)				
		5. Pengiriman studi lanjut bidang ke-PLB-an bagi Guru Inklusi				
		6. Workshop Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah /Guru SLB				
		7. Pengiriman delegasi dalam forum Seminar/ Konferensi tentang Pendidikan Inklusif bagi Guru				
2	Kebijakan dan Regulasi terkait penyelenggara	8. Penyusunan Perda Pendidikan Inklusif di tingkat Prov/Kab/Kota				
		9. Penyusunan Pergub/Perwali/				

No	Program	Di bawah ini terdapat beberapa daftar kegiatan yang terkait dengan Implementasi Pendidikan Inklusif di tingkat Provinsi atau Kab/Kota. (MOHON DIISI SESUAI KONDISI YG SEBENARNYA)	Tidak Ada /Tidak terprogram kan (1)	Ada Terlaksana sebagian (2)	Ada Terlaksana semua (3)	Keterangan (Kalau Ada)
	an Pendidikan Inklusif	Perbup tentang Pendidikan Inklusif				
		10. Penyusunan Edaran Gub/Walikota/Bupati tentang Kebijakan Pendidikan Inklusif				
		11. Penyusunan Pedoman/Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif di tingkat Prov/Kab/Kota				
		12. Teralokasi dana APBD khusus untuk Pendidikan Inklusif				
3	Membangun Kemitraan melalui penguatan networking dalam rangka menciptakan pemahaman dan kepedulian terhadap pendidikan inklusif	13. Pelibatan stakeholders lintas SKPD/Dinas terkait dalam implementasi Pendidikan Inklusif di daerah.				
		14. Melakukan kerjasama dengan pihak lain (PT, LSM, RS, Puskesmas, Dunia Usaha, dll) dalam Pendidikan Inklusif.				
		15. Memanfaatkan media cetak dan elektronik dalam pengembangan Pendidikan Inklusif.				
		16. Pembentukan Paguyuban/Forum Sekolah Inklusif				
		17. Pembentukan paguyuban/forum Guru Pembimbing Khusus sekolah				
4	Piloting Penyelenggara Pendidikan Inklusif	18. Penetapan sekolah Piloting penyelenggara Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA, SMK)				
		19. Bantuan pembiayaan/Sarana Pendidikan kepada sekolah piloting pendidikan inklusif				
		20. Evaluasi dan pembinaan sekolah piloting oleh Dinas/Pokja				
5	Pusat Data, Informasi dan Publikasi	21. Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah tingkat Prov/Kab/Kota yang sudah dan belum bersekolah.				
		22. Pendataan SLB dan Sekolah				

No	Program	Di bawah ini terdapat beberapa daftar kegiatan yang terkait dengan Implementasi Pendidikan Inklusif di tingkat Provinsi atau Kab/Kota. (MOHON DIISI SESUAI KONDISI YG SEBENARNYA)	Tidak Ada /Tidak terprogram kan (1)	Ada Terlaksana sebagian (2)	Ada Terlaksana semua (3)	Keterangan (Kalau Ada)
		Inklusi di tingkat Prov/Kab/Kota.				
		23. Pembuatan dan pengisian Web khusus Pendidikan Inklusif Prov/Kab/Kota.				
		24. Penerbitan Media Informasi Pendidikan Inklusif oleh Pokja Prov/Kab/Kota (Majalah, Bulletin, Leaflet, Brosur, CD, dll)				
		25. Pameran Pendidikan Inklusif di tingkat Prov/Kab/Kota				
		26. Penyelenggaraan forum diskusi/ konsultasi dan edukasi tentang pendidikan inklusif/ABK.				
6	Penataan dan Penguatan Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif.	27. Pembentukan dan pengelolaan SLB dan/atau Lembaga Lain sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.				
		28. Penyediaan bantuan dana khusus untuk kegiatan Pusat Sumber				
		29. Evaluasi dan pembinaan Pusat Sumber oleh Dinas/Pokja Inklusif.				
		30. Keberadaan Pusat Sumber didukung dengan Surat Penetapan/Penunjukan oleh Dinas yang berwenang.				
7	Dokumentasi dan Pelaporan	31. Pokja Inklusi melakukan Dokumentasi semua kegiatan pendidikan inklusif dengan tertib.				
		32. Pokja Inklusi menyusun laporan perkembangan pendidikan inklusif di daerahnya kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara periodic.				
8	Manajemen Pokja Inklusi dan Grand Design Pengembangan Pendidikan Inklusif	33. Pokja Inklusi menyusun Grand Design pengembangan pendidikan inklusi di tingkat Prov/Kab/Kota.				
		34. Pokja Inklusi melakukan Sosialisasi Grand Design Pendidikan Inklusif				

No	Program	Di bawah ini terdapat beberapa daftar kegiatan yang terkait dengan Implementasi Pendidikan Inklusif di tingkat Provinsi atau Kab/Kota. (MOHON DIISI SESUAI KONDISI YG SEBENARNYA)	Tidak Ada /Tidak terprogram kan (1)	Ada Terlaksana sebagian (2)	Ada Terlaksana semua (3)	Keterangan (Kalau Ada)
		Dinas/SKPD terkait.				
		35. Grand Desain Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pihak yang berwenang.				
		36. Pokja Inklusi Prov/Kab/Kota dikuatkan dengan surat keputusan Gubernur (untuk tingkat Prov), Bupati/Walikota (untuk tingkat Kab/Kota).				
		37. Penerbitan, pencetakan dan penyebarluasan pedoman, panduan dan/atau instrument yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.				
		38. Pokja Inklusi memiliki tempat Sekretariat/fasilitas Kantor khusus				
		39. Pokja Inklusi dilengkapi dengan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas				
		40. Pokja Inklusi mendapatkan dukungan biaya operasional dari Prov/Kab/Kota secara periodik				
		41. Pokja Inklusi tetap eksis dan aktif menjalankan tugas dan fungsinya sampai saat ini.				
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	42. Pokja Inklusi memiliki Instrumen/Perangkat Khusus untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.				
		43. Pokja Inklusi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif secara periodik				
		44. Pokja Inklusi melakukan rapat tahunan secara tertib untuk melakukan evaluasi dan penyusunan program tahun berikutnya.				
		45. Sekolah inklusi menyusun laporan tahunan penyelenggaraan pendidikan inklusif				

No	Program	Di bawah ini terdapat beberapa daftar kegiatan yang terkait dengan Implementasi Pendidikan Inklusif di tingkat Provinsi atau Kab/Kota. (MOHON DIISI SESUAI KONDISI YG SEBENARNYA)	Tidak Ada /Tidak terprogram kan (1)	Ada Terlaksana sebagian (2)	Ada Terlaksana semua (3)	Keterangan (Kalau Ada)
		46. Pokja Inklusi menerima dan menampung laporan tahunan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari sekolah				
		47. Pokja Inklusi mengolah dan menindaklanjuti laporan tahunan penyelenggaraan pend. Inklusif. Di tingkat satuan pendidikan				
10	Pencanangan Program sebagai Provinsi/Kab/Kota Inklusif	48. Pemerintah Daerah melakukan pencanangan sebagai Prov/Kab/Kota Inklusi.				
		49. Pencanangan sebagai Prov/Kab/Kota Inklusi dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Pimpinan Daerah.				
		50. Pencanangan sebagai Prov/Kab/Kota Inklusi melibatkan semua pejabat dan pimpinan SKPD serta masyarakat pemangku kepentingan				
11	Kegiatan lain yang tidak termasuk dalam daftar kegiatan di atas (kalau ada)	51.				
		52.				
		53.				
		54.				
		55.				
Jumlah Kegiatan Jumlah Skor (tidak perlu diisi)						

DATA POKJA INKLUSI

Penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini dilaksanakan di dua Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur. Pengukuran terhadap implementasi program pendidikan inklusif pada tingkat kabupaten/kotamadya ini dilakukan dengan mengambil sampel kelompok kerja (POKJA) inklusi dari dua Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur. Peneliti memberikan kuesioner kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan atau ketua POKJA inklusi pada masing-masing kabupaten mengenai program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif. Deskripsi mengenai hasil pengukuran masing-masing bagian implementasi pendidikan inklusif dapat dilihat pada penjelasan berikut.

A. Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Tabel 1. Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	71.4
2	Magetan	61.9
	Rerata	66.7

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pendidikan inklusif sebesar 66,70%.

B. Program Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Tabel 2. Program Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	13.3
2	Magetan	80.0
	Rerata	46.7

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian

program kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif sebesar 46.70%.

C. Program Membangun Kemitraan Melalui Penguatan *Networking* dalam Rangka Menciptakan Pemahaman dan Kepedulian terhadap Pendidikan Inklusif

Tabel 3. Program Membangun Kemitraan Melalui Penguatan *Networking* dalam Rangka Menciptakan Pemahaman dan Kepedulian terhadap Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	33.3
2	Magetan	80.0
	Rerata	56.7

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program membangun kemitraan melalui penguatan *networking* dalam rangka menciptakan pemahaman dan kepedulian terhadap pendidikan inklusif sebesar 56.70%.

D. Program *Piloting* Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Tabel 4. Program *Piloting* Penyelenggara Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	44.4
2	Magetan	77.8
	Rerata	61.1

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program *piloting* penyelenggara pendidikan inklusif sebesar 61.10%.

E. Program Pusat Data, Informasi dan Publikasi

Tabel 5. Program Pusat Data, Informasi dan Publikasi

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	44.4

2	Magetan	66.7
	Rerata	55.6

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program pusat data, informasi dan publikasi sebesar 55.6%.

F. Program Penataan dan Penguatan Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif

Tabel 6. Program Penataan dan Penguatan Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	25.0
2	Magetan	83.3
	Rerata	54.2

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program penataan dan penguatan sistem dukungan pendidikan inklusif sebesar 54.2%.

G. Program Dokumentasi dan Pelaporan

Tabel 7. Program Dokumentasi dan Pelaporan

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	66.7
2	Magetan	100.0
	Rerata	83.4

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program dokumentasi dan pelaporan sebesar 83.4%.

H. Program Manajemen Pokja Inklusi dan *Grand Design* Pengembangan Pendidikan Inklusif

Tabel 8. Program Manajemen Pokja Inklusi dan *Grand Design* Pengembangan Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten /	Capaian
----	-------------	---------

	Kotamadya	(%)
1	Pacitan	40.7
2	Magetan	77.8
	Rerata	59.3

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program manajemen pokja inklusi dan *grand design* pengembangan pendidikan inklusif sebesar 59,3%.

I. Program Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Tabel 9. Program Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	33.3
2	Magetan	77.8
	Rerata	55.6

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebesar 55,6%.

J. Program Pencanaan Program sebagai Provinsi/Kabupaten/Kota Inklusif

Tabel 10. Program Pencanaan Program sebagai Provinsi/Kabupaten/Kota Inklusif

No	Kabupaten / Kotamadya	Capaian (%)
1	Pacitan	55.6
2	Magetan	100.0
	Rerata	77.8

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat dilihat bahwa dari dua kabupaten/kotamadya yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian program perencanaan program sebagai provinsi/kabupaten/kota inklusif sebesar 77.8%.

DRAFT ARTIKEL

EVALUATION OF THE INCLUSIVE EDUCATION PROGRAMS IMPLEMENTATION IN EAST JAVA PROVINCE

Munawir Yusuf, Ravik Karsidi, Erma Kumala Sari, Tias Martika
Special Education Program, Universitas Sebelas Maret Surakarta
munawir_uns@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the implementation of inclusive education at the working group level in the regencies/cities in East Java Province. This study used a quantitative descriptive approach with a focus on implementing the inclusion working group in the regency/city. The subject of this study was two working groups in East Java Province (Pacitan and Magetan). All of the working groups' chairmen were four people who were used as research samples. The data collection technique used was questionnaires that had been tested for validity and reliability. The collected data were tabulated to calculate the percentage, then described to interpret the results of the data collection. The results of the study stated that the implementation of the inclusion working group in East Java province was well underway as seen from the average achievement score of implementation of inclusive education which was included in the good category (61.71%).

Keywords: inclusive education; evaluation; inclusion working group; East Java.

INTRODUCTION

Inclusive education is one of the issues that has been the focus of research in the education field lately. Much of the research that has been done relates to inclusive education in the world [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]. Many studies on inclusive education have been highlighted about the implementation of inclusive education in schools [1] [5] [10] [11] [12]. Some other studies focus on students in inclusive schools [1] [5] [10]. Some other studies focus on teachers in inclusive schools [4] [6] [9] [10] [11] [12] [13]. Inclusive education is also one of the important focus of research in the field of education in Indonesia [11] [12] [13].

Few studies have focused on implementing inclusive education in the government level. Meanwhile, the government is one part of the system of support for the implementation of inclusive education [14]. The government support system can be in the form of regulations and policies, facilities and infrastructure support, financial support, human resource support, and supporting institutions [14]. Therefore, this study focuses on things that are different from other focus of inclusive education research, namely the implementation of inclusive education programs in the government level.

The implementation of inclusive education programs in schools is inseparable from the government's role in regulating the implementation of the inclusive education program, both central, provincial, and district/city governments. Implementation of inclusive education programs in schools is based on policies and regulations that have been regulated by the government. The Indonesian government has regulated regulations related to inclusive education as a form of support for the implementation of inclusive education in Indonesia, such as Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009 on Inclusive Education for children who have abnormalities and have intelligence potential and/or special talents [15]. In addition, there are also regulations that support the implementation of inclusive education at every level of education, namely the Ministry of National Education Ministry of Education Directorate General Circular Letter Number. 380/C.C6/MN/2003 January 20, 2003: "Every district/city is required to organize and develop inclusive education in at least 4 (four) schools consisting of; Elementary, Middle School, High School, Vocational School" [16].

One of the supporting institutions of the implementation of inclusive education in the government level is the Inclusive Education Working Group, both at national, provincial, and district/city levels. In carrying out inclusive education programs, district/city governments are assisted by the Inclusive Education Working Group on planning, implementation, and monitoring. The Inclusive Education Working Group (Inclusive Working Group) has the task of compiling an inclusive education work program, carrying out outreach and fostering the implementation of inclusive education, and carrying out monitoring and evaluation of inclusive education [14].

Thus, one of the factors that determines the success of inclusive education programs is the performance of the Inclusive Education Working Group. This is in accordance with the opinion of Salend which states that one of the factors influencing inclusive education is the existence of support groups that work with schools and other parties so that they are expected to help meet the needs of students in schools and the achievement of inclusive education goals [17]. Therefore, the management of inclusive education programs by the Inclusive Education Working Group in the district needs to be evaluated to determine their performance and achievements.

East Java Province is one of the provinces where some of the districts/cities have declared themselves as Inclusive districts/cities. Thus, some districts in East Java have implemented inclusive education programs with the support of the Inclusive Education Working Group. Programs that are part of the inclusive education program compiled by the Inclusive Education Working Group are related to human resources, policies and regulations, partnerships, piloting programs, data centers and publications, support systems, documentation and reporting, management and grand design, monitoring and evaluation programs, Inclusive programs for cities/districts. Thus, evaluation and monitoring need to be carried out on the implementation of special education in districts or cities in East Java Province. It needs to be done to find out the process and results of implementing inclusive education in districts or cities in the East Java province. Based

on this description, this research was conducted with the aim of studying the implementation of inclusive education at the level of the Inclusive Working Group in the East Java Province.

METHOD

This study used a quantitative descriptive approach with a focus on the implementation of the Inclusion Working Group in the Regency/City. The subject of this study was two Inclusive Working Groups in East Java province (Pacitan and Magetan). All inclusive working groups' chairmen were four people as research samples. The data collection technique used questionnaires that had been tested for validity and reliability. The data that has been collected was tabulated to calculate the percentage, then described to interpret the results of the data collection.

RESULTS AND DISCUSSION

The following are the results of research related to the evaluation and monitoring of the implementation of inclusive education in East Java Province.

A. Human Resource Capacity Building Program of Inclusive Education Organizers

Based on Table 1, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average achievement of the capacity building program for human resources for inclusive education was 66.70%. Pacitan regency has the higher achievement (71.4%) and Magetan regency has the lower achievement (61.9%).

Table 1. Human Resource Capacity Building Program of Inclusive Education Organizer

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	71.4	Good
2	Magetan	61.9	Good
	Average	66.7	Good

Suggestions for the inclusive education implementation in the form of the active role of schools in the implementation of inclusive education, good teacher recruitment, and government support related to educational facilities and infrastructure [18]. Human resource capacity building program for inclusive education organizer, which include:

1. Socialization of Inclusive Education for School Principals (Elementary, Middle School, High School, Vocational High School)
2. Inclusive Education Workshop/Training for regular school teachers (elementary, junior high, high school, vocational high school)
3. Inclusive Education Training for Special Education Teachers
4. Comparative Study of Inclusive Education for Teachers in other schools (outside the Province/Regency/City)

5. Delivery of further studies in the field of special education for Inclusive Teachers
6. Inclusive Education Workshop for SLB Principals/ Teachers
7. Delegation of delegates at the Seminar/Conference forum on Inclusive Education for Teachers

B. Program on Policy and Regulation on the Implementation of Inclusive Education

Based on Table 2, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average program achievements and policies related to the implementation of inclusive education were 46.7%. Magetan regency has the higher achievement (80.0%) and Pacitan regency has the lower achievement (13.3%).

Table 2. Program on Policy and Regulation on the Implementation of Inclusive Education

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	13.3	Very less
2	Magetan	80.0	Good
	Average	46.7	Moderate

Program on policy and regulation on the implementation of inclusive education, which include:

1. Preparation of regional regulations on Inclusive Education at the Provincial/Regency/City level
2. Preparation of Governor's Regulation/Mayor's Regulation/Regent's Regulation on Inclusive Education
3. Preparation of Governor/Mayor/Regent Circular Letter on Inclusive Education Policy
4. Preparation of Guidelines/Minimum Service Standards for Inclusive Education at the Provincial/Regency/City level
5. Allocated regional expenditure income budget for Inclusive Education

C. Partnership Building Program through Network Strengthening to Create Understanding and Concern for Inclusive Education

Based on Table 3, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average program achievement was building partnerships through strengthening networking in order to create understanding and concern for inclusive education at 56.7%. Magetan regency has the higher achievement (80.0%) and Pacitan regency has the lower achievement (33.3%).

Table 3. Partnership Building Program Through Network Strengthening To Create Understanding And Concern For Inclusive Education

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	33.3	Less
2	Magetan	80.0	Good
	Average	56.7	Moderate

The success of the inclusive education implementation will depend on collaboration between the government, teachers and parents [19]. Partnership building program through network strengthening, which include:

1. The involvement of stakeholders across SKPD/related offices in the implementation of Inclusive Education in the region
2. Collaborate with other parties (Universities, NGOs, Hospitals, Health Centers, Business World, etc.) in Inclusive Education.
3. Utilize print and electronic media in the development of Inclusive Education.
4. Establishment of the Inclusive School Forum/Association
5. Establishment of the Special Guidance Teacher Association/Forum

Inclusive Education Organizer Piloting Program

Based on Table 4, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average piloting program for providers of inclusive education was 61.1%. Magetan Regency has the higher achievement (77.8%) and Pacitan Regency has the lower achievement (44.4%).

Table 4. Inclusive Education Organizer Piloting Program

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	44.4	Moderate
2	Magetan	77.8	Good
	Average	61.1	Good

Inclusive education organizer piloting program, which include:

1. Determination of piloting school organizers of Inclusive Education (elementary, junior high, high school, vocational high school)
2. Financing assistance/Education Facilities to inclusive education piloting school
3. Evaluation and coaching of piloting schools by the agency/Working group

Data, Information and Publication Center Program

Based on Table 5, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average data center, information and

publication program achieved 55.76%. Magetan Regency has the higher achievement (66.7%) and Pacitan Regency has the lower achievement (44.4%).

Table 5. Data, Information and Publication Center Program

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	44.4	Moderate
2	Magetan	66.7	Good
	Average	55.6	Moderate

Data, information, and publication center program, which include:

1. Data Collection of Children with Special Needs of school age at the Provincial / Regency / City level who have and have not gone to school.
2. Data Collection of Special Schools and Inclusion Schools at the Provincial/Regency/City level.
3. Preparation and filling of special Web for Provincial/Regency/City Inclusive Education.
4. Issuance of Inclusive Education Information Media by Provincial/District/City Working groups (Magazines, Bulletins, Leaflets, Brochures, CDs, etc.)
5. Inclusive Education Exhibition at the Provincial/District/City level
6. Organizing discussion/consultation and education forums on inclusive education.

Program for Structuring and Strengthening Inclusive Education Support Systems

Based on Table 6, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average achievement program arrangement and strengthening of the inclusive education support system amounted to 54.2%. Magetan Regency has the higher achievement (83.3%) and Pacitan Regency has the lower achievement (25.0%).

Table 6. Program for Structuring and Strengthening Inclusive Education Support Systems

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	25.0	Less
2	Magetan	83.3	Very good
	Average	54.2	Moderate

Program for structuring and strengthening inclusive education support systems, which include:

1. Establishment and management of special schools and/ or other institutions as an Inclusive Education Resource Center.
2. Provision of special financial assistance for Resource Center activities
3. Evaluation and guidance of the Resource Center by the Agency/Inclusion Working group
4. The existence of a Resource Center is supported by a
5. Letter of Determination/ Appointment by the authorized Office.

Documentation and Reporting Program

Based on Table 7, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average documentation and reporting program achieved 83.4%. Magetan Regency has the higher achievement (100%) and Pacitan Regency has the lower achievement (66.7%).

Table 7. Documentation and Reporting Program

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	66.7	Good
2	Magetan	100.0	Very good
	Average	83.4	Very good

Documentation and reporting program, which include:

1. The Inclusion Working group conducts documentation of all inclusive education activities in an orderly manner.
2. The Inclusion Working group compiles reports on the progress of inclusive education in its regions for the Regional Government and the Central Government periodically.

Program of Management for Inclusion Working Group and Grand Design for Inclusive Education Development

Based on Table 8, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average achievement of the inclusion working group management program and the grand design of inclusive education development was 59.3%. Magetan Regency has the higher achievement (77.8%) and Pacitan Regency has the lower achievement (40.7%).

Table 8. Program Of Management For Inclusion Working Group And Grand Design For Inclusive Education Development

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	40.7	Moderate
2	Magetan	77.8	Good

	Average	59.3	Moderate
--	---------	------	----------

Program of management for inclusion working group and grand design for inclusive education development, which include:

1. Inclusion working group develops Grand Design for the development of inclusive education at the Provincial/Regency/City level.
2. Inclusion working group conducts the Grand Design of Inclusive Education Office/related SKPD.
3. Grand Design of Inclusive Education is determined by a Decree by the competent authority.
4. The inclusion of Provincial/Regency/City working groups is reinforced by the Governor's decree (for the Provincial level), Regent/Mayor's decree (for the Regency/ City level).
5. Issuance, printing, and distribution of guidelines and/or instruments related to the implementation of inclusive education.
6. Inclusion working groups have special secretariat office/ facilities
7. Inclusion working groups are equipped with clear organizational structures and work procedures
8. Inclusion working groups get periodic support from operational costs from the Province/Regency/City
9. The inclusion working group still exists and actively engages its duties and functions to date.

Inaugurating Programs as Inclusive Regencies/Cities

Based on Table 9, it can be seen that from the four districts that were the sample of the study, the average achievement of the monitoring program and evaluation of the implementation of inclusive education was 55.6%. Magetan Regency has the higher achievement (77.8%) and Pacitan Regency has the lower achievement (33.3%).

Table 9. Inaugurating Programs As Inclusive Regencies/Cities

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	33.3	Less
2	Magetan	77.8	Good
	Average	55.6	Moderate

Program of inaugurating inclusive provinces/regencies/ cities:

1. Local Government decides as Inclusive Province/Regency/City.
2. Declaration as Inclusive Province/Regency/City is confirmed in the form of a Decree by the Regional Leader.

3. The declaration as Inclusive Province/Regency/City involves all officials and leaders of the SKPD and the stakeholder community.

Launching Program as an Inclusive Regencies/Cities

Based on Table 10, it can be seen that from the four districts/municipalities that were the sample of the study, the average achievement of the program as a provincial/district/city inclusive declaration was 94.45%. Magetan Regency has the higher achievement (77.8%) and Pacitan Regency has the lower achievement (33.3%).

Table 10. Launching Program as an Inclusive Regencies/Cities

No	Regency/City	Achievement (%)	Category
1	Pacitan	55.6	Moderate
2	Magetan	100.0	Very good
	Average	77.8	Good

The impact of inclusion policies can be seen from the increase in the number of students with special needs in regular schools from year to year and the reduced discrimination of students with special needs by peers, teachers, and the community [20].

CONCLUSION

Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementation of inclusive education at the Working Group level of the Regency/City in East Java province has been carried out well. This is indicated by the average value of the implementation of the results included in the moderate category of 61.71%.

REFERENCES

- [1] P. Bendová & A. Fialová, "Inclusive education of pupils with special educational needs in Czech Republic primary schools," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 171, pp. 812 – 819, Elsevier Ltd, 2015.
- [2] V. S. Bermejo, F. V. Castro, F. M. Martínez, & D. P. Góngora, "Inclusive Education in Spain: Developing Characteristics in Madrid, Extremadura and Andalusia," *Research in Comparative and International Education*, vol. 4, no. 3, pp. 321-333, January 2009.
- [3] L. Maudslay, "Inclusive education in Nepal: Assumptions and reality, *Childhood*, vol. 21, no. 3, pp. 418-424, January 2014.
- [4] P. Kantavonga, T. Nethanomsakb, & N. Luang-ungkoolc, *Inclusive Education in Thailand after 1999 National Education Act: A review of a pre-service teacher*

- education system”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, “vol. 69, pp. 1043 – 1051, Elsevier Ltd, 2012.
- [5] S. Mukhopadhyay, H. J. Nenty, & O. Abosi, “Inclusive Education for Learners with Disabilities in Botswana Primary Schools,” *SAGE Open*, vol. 2, June 2012.
 - [6] A. W. McCrimmon, “Inclusive Education in Canada: Issues in Teacher Preparation. Intervention in School and Clinic,” vol. 50, no. 4, pp. 234-237, August 2014.
 - [7] J. B. G. Tilak, “How Inclusive Is Higher Education in India?,” *Social Change*, vol. 45, no. 2, pp. 185-223, June 2015.
 - [8] L. A. Valeeva, “The Current State of Special Needs Education in Russia: Inclusive Policies and Practices,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 191, pp. 2312 – 2315, Elsevier Ltd, 2015.
 - [9] T. R. Van Laarhoven, D. D. Munk, K. Lynch, J. Bosma, & J. Rouse, “A Model for Preparing Special and General Education Preservice Teachers for Inclusive Education,” *Journal of Teacher Education*, vol. 58, no. 5, pp. 440 – 455, November/Desember 2007,.
 - [10] S. J. Salend & L. M. G. Dunhaney, “The Impact of Inclusion on Students With and Without Disabilities and Their Educator,” *Journal of Remedial and Special Education*, vol. 20, no. 2, pp. 114 – 126, March 1999.
 - [11] M. Yusuf & E. K. Sari, “Self Evaluation of Special Educaion Teacher Competence in Inclusive School in Indonesia,” *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research (ASSEHR)*, vol. 158, pp. 487-495, Published by Atlantis Press, 2017 [The International Conference on Teacher Training and Education 3rd (ICTTE 3rd)].
 - [12] M. Yusuf, E. K. Sari, Priyono, & A. Anggrellanggi, “Identification of Problems and Needs of Professional Development of Special Education Teacher in Inclusive School,” *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research (ASSEHR)*, vol. 262, pp. 23-27, Published by Atlantis Press, 2018 [The International Conference on Teacher Training and Education 4th (ICTTE 4th)].
 - [13] M. Yusuf, E. K. Sari, M. Supratiwi, & A. Anggrellanggi, “Performance of Shadow Teachers in Inclusive Schools in Indonesia viewed from Working Understanding, Appreciation of Work, and Career Guidance,” *International Journal of Education Economics and Development*. Vol. 9, no. 4, pp. 411-419, Published by Inderscience Enterprises Ltd, 2018.
 - [14] Suaidinmath, “Support System of Inclusive Education, 2010, <https://suaidinmath.wordpress.com/2010/05/08/sistem-dukkungan-pendidikan-inklusif/> on 22 November 2017.
 - [15] Regulation of Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009 on Inclusive education for children who have abnormalities and have intelligence potential and/or special talents.
 - [16] Circular Letter of the Directorate General of Basic Education Ministry of Education Number. 380/C.C6/MN/2003 January 20, 2003.
 - [17] “S.J. Salend, “Creating Inclusive Classroom. Effective and Reflective Practice,” New Jersey: Pearson Education, 2011.

- [18] Muazza, dkk, “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi: Studi STudi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi”. *JURNALKEPENDIDIKAN*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-12, 2018.
- [19] Angga Saputra, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif”. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 3 hal: 1-14, 2016.
- [20] Lukitasari, S.W., “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi”. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 4 No. 2 hal 121-134, 2017.